



# Banyak Guru di Nusa Penida Malas



WAYAN PUTRA/RADAR BALI

**TERBAIKAN:** Siswa SD di Nusa Penida tidak mendapat pendidikan maksimal karena banyak guru yang malas.

## Dewan Minta Disdikpora dan Bupati Beri Peringatan

**SEMARAPURA** - Guru Sekolah Dasar (SD) yang mengajar di Nusa Penida banyak yang malas. Tuduhan ini diungkapkan Anggota Komisi III DPRD Klungkung dari Fraksi PDIP berdasar sidak yang digelar Komisi III DPRD Klungkung.

"Berdasar sidak kami temukan banyak guru SD yang malas mengajar di Nusa Penida," kata Misna kemarin (7/8). Bahkan kemarin Komisi III kembali melakukan sidak di SD 4 Skati, Nusa Penida, yang dipimpin langsung Ketua Komisi III I Made Jana. Di sana, dari delapan guru yang masuk hanya empat orang. Sedangkan di sekolah tersebut total siswa yang mencapai 53 orang dan sembilan orang di antaranya masih kelas I.

Dari sana rombongan wakil rakyat tersebut langsung menuju SD 8 Sakti. Kondisi disini lebih parah lagi karena ada 10 guru yang hadir saat itu hanya dua orang guru. Sementara delapan guru lainnya tidak hadir tanpa pemberitahuan atau tanpa keterangan.

Sementara jumlah siswa di SD 8 adalah 27 orang, sementara itu sekolah ini tidak berhasil menerima siswa baru tahun ajaran ini.

Melihat kondisi tersebut Misna yang juga asli Nusa Penida mengaku kecewa sangat menyayangkan guru yang malas masuk atau mengajar pada awal tahun ajaran ini. Karena apa yang dilakukan guru malas tersebut jelas telah melanggar dan merugikan masyarakat. Di mana anak-anak sekolah di SD tersebut berhak akan pendidikan yang bagus. Namun kalau guru jarang masuk jelas hak-hak mereka untuk

mendapat pendidikan akan terabaikan.

Terlebih lagi program pemerintah sekarang ini untuk meningkatkan kualitas pendidikan siswa SD. "Kalau gurunya malas seperti ini bagaimana meningkatkan kualitas pendidikan," ujar wakil rakyat yang juga guru gong tersebut.

Misna sendiri mengakui kalau rata-rata guru SD di Nusa Penida malas masuk. Dirinya mengaku sudah tiga kali sidak ke SD di Nusa Penida. Sejauh ini kondisinya hampir sama, yakni sebagian besar guru-guru tidak

masuk atau malas mengajar. Untuk itu Komisi III DPRD Klungkung berharap agar Disdikpora Klungkung bisa memberikan teguran kepada guru-guru malas. "Saya berharap Kadisdikpora dan Pak Bupati bisa memberikan teguran kepada guru malas tersebut," tandas dia.

Sementara mengenai fasilitas, diakuinya di beberapa SD di pedalaman di Nusa Penida fasilitas yang ada sudah cukup bagus. Di bagian lain Kadisdikpora Klungkung Nyoman Mudarta belum bisa dikonfirmasi terkait masalah tersebut. Ketika dihubungi Mudarta tidak mengangkat ponselnya, padahal aktif. (tra/gup)

Edisi : Sabtu, 8 Agustus 2015

Hal : 25



## Radar Bali

### DUGAAN KORUPSI

## Kasus Undiksha Tunggu Hasil Audit BPKP

**KASUS** dugaan korupsi Undiksha sudah menahan dua tersangka. Yang pertama adalah PPK (Pejabat Pembuat Komitmen) Suarsa dan Pemilik tanah Nyoman Mustiara. Kasus ini sedang dikebut oleh Tim Jaksa, di mana saat ini tim jaksa menunggu hasil audit BPKP. Setelah hasil audit keluar, proses pemberkasan dijalankan dan setelah itu dilimpahkan.

Ketua Tim Jaksa Penyidik Wayan Suardi mengatakan dirinya sedang di Singaraja untuk proses alat bukti. Dan mengirim surat perpanjangan penahanan. "Saya di Singaraja untuk bawa surat perpanjangan penahanan. Dan mengambil alat bukti," ungkapny.

Dia juga mengatakan, saat ini proses yang sedang berlangsung adalah menunggu hasil audit di BPKP. Jika hasil audit sudah lengkap, tinggal melakukan pemberkasan. Jika pemberkasan selesai, dilanjutkan Pra Tuntutan dan baru dilakukan pelimpahan. "Sekarang kami menunggu hasil audit dulu, kalau kelar lanjut pemberkasan, hingga nanti pelimpahan untuk sidang," tandas Suardi.

Seperti diberitakan sebelumnya, pengadaan lahan 3,7 hektar merugikan negara Rp 3 miliar lebih. Kasus Undiksha kasus ini sebelumnya ditangani oleh Polda Bali. Subdit III Reskrimsus Polda Bali kembali melakukan pemanggilan terhadap dua orang anggota Tim Pengadaan Tanah Universitas Pendidikan Ganesha (Undhiksa) Singaraja. Mereka yang dipanggil adalah Prof. Dr. Wayan Rai dan Ida Bagus Emaharta. Keduanya dihadirkan sebagai saksi atas dugaan adanya *mark up* tanah yang dilakukan beberapa oknum dosen dan pegawai Undiksha. Namun kasus ini juga ditangani oleh Kejati Bali. Sampai akhirnya Kejati Bali menetapkan 5 tersangka.

Lima tersangka ini adalah Wayan Suarsa, Mustiara dua orang ini sudah ditahan. Kemudian yang belum ditahan ada Kepala Desa Jineng Dalem Mawa, makelar Dewa Indra dan Kabag Perencanaan Undiksha Gusti Susilanata.

Kasus yang diusut Polda dan Kejati ini adalah, terkait pembelian lahan tanah seluas di daerah Jinengdalem, Singaraja, untuk pembangunan gedung Fakultas Olahraga dan Kesehatan pada tahun 2009 lalu. Saat ditemui koran ini di Lingkungan Mapolda Bali, Prof. Dr. Wayan Rai mengatakan jika dirinya hanya ditanyakan terkait masalah kronologi pembentukan tim pengadaan tanah tersebut.

Selebihnya dia mengatakan bahwa dirinya menjawab awal pembentukan tim tersebut atas perintah Rektor Undiksha Prof. Nyoman Sudiana. Indikasi permainannya, tanah dibeli Rp 6,5 juta per are, namun oleh panitia, harga tersebut di markup menjadi Rp 18 juta per are. Sehingga ada indikasi negara dirugikan miliaran. (art/han)



## INFRASTRUKTUR



ZULFIKA RAHMAN/RADAR BALI

**MUBAZIR:** Kios Pasar Hewan Kayuambua yang tak ditempati.

### Kios Pasar Kayuambua Mangkrak

**BANGLI** - Belasan Kios yang berada di Pasar Hewan Kayuambua, Kecamatan Susut, terlihat mangkra. Kios yang berada di pasar tersebut sudah tidak beroperasi lagi sehingga beberapa dari bangunan tersebut kropos.

Pantauan koran ini Jumat (7/8) kemarin, jika terdapat 17 unit bangunan kios yang sudah tidak digunakan, terdapat empat unit bangunan kios yang sudah lapuk dan hampir roboh. Tak hanya itu, bangunan yang tak kalah parahya yakni terdapat pada bagian timur pasar hewan. Bangunan yang dulunya dipakai tempat pengolahan pakan ternak kini tidak terpakai lagi.

Kepala Pasar Hewan Kayuambua yakni Sang Made Kasiapa saat dikonfirmasi mengatakan jika bangunan tersebut sudah sejak lama tidak berfungsi. Dari 20 unit bangunan kios hanya tiga yang masih beroperasi, dan itu juga karena lokasi yang strategis yakni berdekatan dengan jalan raya. "Yang jelas kondisi ini terjadi jauh sebelum masa kepemimpinan saya, untuk tahun pastinya saya juga tidak tahu," ungkapnya.

Lebih lanjut Pria asal Cempaga ini menuturkan jika kondisi tersebut lantaran lokasi kios yang berada di tempat yang sepi. Sedangkan, kondisi ramai hanya dirasakan tiga hari sekali yakni pada waktu pasar hewan beroperasi. Kemungkinan, para pedagang merugi, sehingga memilih pindah dan berjualan di pasar umum yang terletak sebelah utara pasar hewan ini. "Kalau di pasar umum ramainya hampir setiap hari dikunjungi masyarakat, mungkin itu faktor penyebabnya," tuturnya.

Dikonfirmasi terpisah Kabag Umum Setda Bangli I Made Mahindra Putra mengungkapkan jika bangunan kios tersebut merupakan aset daerah Kabupaten Bangli, dan untuk pengelolaannya dari Dinas Peternakan dan Prikanaan Bangli. "Pihak kami hanya menangani masalah aset daerah saja," pungkasnya. (zul/gup)

Edisi : Sabtu, 8 Agustus 2015

Hal : 25



# Server Jebol, Akta dan KTP Badung Macet

## Kadisdukcapil Minta Baru ke Jakarta

**MANGUPURA** - Gawat! Pelayanan administrasi kependudukan di Kabupaten Badung terutama perekaman atau pembuatan KTP mengalami gangguan serius. Selain tidak bisa merekam KTP elektronik, kerusakan tersebut juga menyebabkan pembuatan akta nikah dan kelahiran tersendat. Pasalnya, piranti yang menyimpan server atau data induk jebol sejak Selasa lalu (4/7). Celakanya, hingga kemarin (7/8) server tersebut belum diperbaiki. Selain membuat kerusakan berla-larut membuat pelayanan kependudukan macet, data yang tersimpan dalam server tersebut juga dikhawatirkan ikut musnah.

Salah seorang pegawai Dinas Kependudukan Catatan Sipil (Disdukcapil) mengatakan, jebolnya server ini membuat pelayanan di seluruh kecamatan di Badung otomotasi ikut terhenti. Pegawai itu pun menyebut saat ini Disdukcapil cukup kerepotan memperbaiki server yang rusak. Menurut pegawai tersebut, karena belum diperbaiki, maka para pegawai Disdukcapil belum bisa melayani administrasi kependudukan. "Sampai tadi (kemarin, Red) kami belum bisa kerja. Server belum bisa diperbaiki karena memang sudah keluaran lama. Tapi server itu menyimpan

seluruh data penduduk di Badung," ujar pegawai Disdukcapil yang tidak mau ditulis namanya kemarin (7/8).

Sementara itu, Kepala Disdukcapil Kabupaten Badung Nyoman Soka saat dikonfirmasi terpisah membenarkan jika pihaknya belum bisa kembali memberikan pelayanan. Server tersebut menyimpan data kependudukan di Badung. "Yang jelas server sudah tidak bisa diperbaiki. Kami sudah meminta baru ke Jakarta, kemungkinan Selasa depan datang dari Jakarta," papar Soka.

Pejabat asal Jimbaran itu menyebut, selain keadaan perangkatan yang dinilai sudah berumur, dirinya pun tidak memungkiri bahwa ada kemungkinan teknis yang mengakibatkan teradinya kerusakan. "Ini *dah*, yang namanya kerusakan memang ada di luar perkiraan. Tapi data aman, masih aman," tegasnya.

Soka juga membenarkan jika data induk kependudukan berada dalam server yang telah jebol tersebut. Namun dia mengklaim data tersebut masih tetap aman. "Jadi pengaruhnya itu adalah tidak bisa melakukan pelayanan secara sementara. Mudah-mudahan itu sudah ada dalam rentang waktu seminggu ke depan," imbuhnya.

Dia berharap masyarakat umum bisa maklum dan bersabar dengan kondisi ini. Karena bagaimanapun juga, pihaknya di Disdukcapil Kabupaten Badung akan tetap berusaha melakukan langkah terbaik. (**san/han**)

Edisi : Sabtu, 8 Agustus 2015

Hal : 24